



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut Dhewi dan Kartika (2012:5) Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung (secara lisan) maupun tidak langsung (melalui media), proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Komunikasi dalam sebuah lembaga/instansi dipercayakan kepada orang yang professional, tugasnya menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas dan sesuai dengan fakta kebenarannya. Harapan dengan adanya komunikasi yang dilakukan dalam suatu lembaga yaitu menghasilkan kesamaan pemahaman agar tercapainya tujuan instansi yang diinginkan bersama. Kesamaan pemahaman yang dimaksud yaitu dengan adanya respon atau tanggapan dari public dan hal ini berkaitan dengan peran seorang public relation atau humas yaitu sebagai jembatan penghubung lembaga/instansi dengan publiknya. Sebagai penyampai informasi pemerintahan, humas pemerintah juga berfungsi untuk menyikapi berbagai isu-isu berita yang berkembang saat ini, sehingga masyarakat memperoleh terpaan informasi yang benar, terlebih saat sekarang ini banyak kemunculan informasi yang kurang akurat (Budhirianto, 2015:30).

Menurut Suprawoto (2018:48), humas pemerintah merupakan fungsi manajemen yang membantu organisasi merumuskan organisasi serta membantu organisasi beradaptasi dengan tuntutan konstituen di lingkungan. Humas pemerintah juga sebagai mata dan telinga organisasi, bagaimana mengelola tuntutan konstituen dan kemudian memberikan teori masukan kepada organisasi. Humas dalam instansi pemerintahan atau perusahaan swasta banyak dibutuhkan, terbukti dengan pesatnya perkembangan humas di Indonesia. Seorang humas juga dituntut untuk bisa memelihara citra positif yang ada pada instansi tersebut.

Citra mencerminkan apa yang dipikirkan, emosi dan persepsi individu. Walaupun orang melihat objek yang sama, tapi bisa saja persepsi yang ditimbulkan berbeda. Tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat berbagai program pemerintah yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik.

Citra dibentuk melalui ilmu pengetahuan dan berita yang diterima, agar citra seseorang dapat dipahami dalam sebuah objek dan dapat dilihat melalui sikap terhadap objek tersebut (Soemirat & Ardianto, 2017). Pengetahuan dan berita tersebut harus dibangun dengan baik agar citra yang ditimbulkan masyarakat juga berdampak baik. Peran humas disini juga menjadi kunci dalam pembuatan pengetahuan dan berita yang baik di kalangan masyarakat.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri membutuhkan sistem komunikasi yang sangat baik demi terjaganya kestabilan kementerian dan citra positif kementerian di mata rakyat Indonesia sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam sektor pertahanan dalam pemerintahan Indonesia. Kementerian Pertahanan dalam hal ini menjalankan tugas tersebut melalui Biro Hubungan Masyarakat yang menjadi pengawal paling depan dalam menjaga

kestabilan komunikasi kemeterian, penyampaian informasi pertahanan kepada masyarakat, dan menjaga citra positif kementerian. Mukarom (2015:21), peranan praktisi humas pada suatu organisasi merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi *public relation* dan komunikasi organisasi, di samping sebagai sarana pengembangan profesionalitas dari praktisi humas.

Sebuah institusi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dibentuk oleh pemerintah yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Program yang dijalankan institusi Kementerian Pertahanan akan berjalan lancar apabila mendapat dukungan dari masyarakat publik. Institusi kementerian perlu membina hubungan baik dengan *stakeholder*, seperti yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya dalam mempertahankan pertahanan wilayah Indonesia. Institusi pemerintah perlu melakukan sikap transparansi dalam memberikan informasi kepada publik tentang program-program dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan masalah yang dihadapi, agar publik mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Adanya timbal balik antara pemerintah dengan publik akan sangat berguna bagi pengembangan program lanjutan yang telah dibuat oleh pemerintah dan diharapkan rasa simpati publik terhadap program yang dijalankan pemerintah dapat mengundang partisipasi aktif dari publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh praktisi humas sendiri sangat banyak seperti mengatasi persepsi negatif, penolakan oleh publik kepada instansi, *statement* seorang analis yang bisa merusak citra instansi, serta hal lainnya yang berhubungan dengan urusan social instansi dengan masyarakat.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Akhir dengan judul Tugas dan Fungsi Humas di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, meliputi:

- 1) Apa saja tugas dan fungsi humas dalam menjaga citra positif kementerian?
- 2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam menjaga citra positif Kementerian Pertahanan?

### Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Tugas dan Fungsi Humas di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, meliputi:

- 1) Menjelaskan tugas dan fungsi humas Kementerian Pertahanan dalam menjaga citra positif kementerian.
- 2) Menjelaskan dan membahas apa saja hambatan yang dihadapi humas dalam menjaga citra positif Kementerian Pertahanan.

### METODE

#### Lokasi dan Waktu PKL

Lokasi pengumpulan data untuk melengkapi Laporan Akhir ini bertempat di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110. Waktu pengumpulan data dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) mulai dari 02 Februari hingga